

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini akan dibahas sejumlah penelitian yang telah dilakukan dalam normalisasi Maroko dengan Israel pada tahun 2020. Selanjutnya bab ini juga akan membahas teori yang digunakan dalam mengkaji normalisasi hubungan diplomatik Maroko-Israel.

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Dalam sub bab mengenai tinjauan Pustaka akan dibahas berbagai kajian terdahulu mengenai normalisasi Diplomatik Maroko dan Israel. Selain itu akan dijelaskan apa saja kesimpulan penelitian terdahulu sehingga akan diketahui apa novelty dari penelitian ini.

**Pertama**, Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 5. No.2. yang berjudul Transaksionalisme Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Maroko-Israel oleh Ilham, M., & Paksi, A. K. (2022) Bertujuan untuk mencari tahu alasan dibalik normalisasi hubungan Maroko-Israel dari sudut pandang Maroko, artikel ini menggunakan konsep transaksionalisme sebagai kerangka berfikirnya. Artikel ini menarik kesimpulan bahwa Maroko menyetujui normalisasi hubungannya dengan Israel karena adanya transaksionalisme yang dilakukan Amerika Serikat. Sebagai negara sekutu Israel, AS memberikan tiga insentif atau imbalan kepada Maroko agar kesepakatan normalisasi tercapai, yakni: adanya perjanjian pemberian insentif berupa pengakuan kedaulatan atas wilayah Sahara Barat, pemberian dana investasi sebesar \$3 milyar serta penjualan peralatan militer modern dengan nilai \$1 milyar.<sup>11</sup>

**Kedua**, Konflik Sahara Barat: Intervensi Amerika Serikat Dalam Maroko dan Polisario Front. Pcd Studies Center Annual Review. Edisi 1, oleh Rahmat Ilahi,

---

<sup>11</sup> Ilham, M., & Paksi, A. K. (2022). Transaksionalisme Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Maroko-Israel. Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 5. No. 2.

Siti Zaimatun Nabila. (2022). Dalam artikel yang bertujuan untuk menganalisis dampak dari intervensi Amerika Serikat yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat terhadap konflik yang sedang berlanjut di kawasan tersebut, penulis memiliki argument utama yang menyatakan bahwa bahwa intervensi yang dilakukan AS di Sahara Barat adalah usahanya untuk menegaskan hegemoni di Timur Tengah. Dalam mendukung argumennya, artikel ini berkesimpulan bahwa kepentingannya AS dalam memberikan kedaulatan Sahara Barat pada Maroko selama Maroko setuju untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dinilai penulis sebagai keinginan untuk menegaskan status hegemon AS di kawasan Timur Tengah, juga sebagai dukungan atas keberadaan sekutunya, yakni Israel. Kaitannya dengan Israel adalah bagaimana AS mengupayakan pengakuan negara-negara di Timur Tengah atas Israel dengan tujuan untuk mengupayakan kebijakan AS di kawasan tersebut. Meskipun AS memutuskan bahwa pemebrian kedaulatan wilayah Sahara Barat kepada Maroko merupakan sebuah keputusan yang tepat untuk menjaga kawasan tetap stabil, intervensi AS yang tidak membawa kerugian yang begitu nyata dan signifikan bagi Polisario Front tetap menyisakan dampak negatif bagi para pejuang Polisario Front itu sendiri karena perjuangan mereka yang dianggap sia-sia. Polisario Front berpendapat bahwa kedaulatan sebuah wilayah sudah seharusnya diperjuangkan oleh masyarakat regionalnya dan bukan diputuskan berdasarkan intervensi asing.<sup>12</sup>

**Ketiga,** Why “Peace” Between Morocco and Israel Matters for Western Sahara But Not for the Israeli-Palestinian Conflict. *African Conflict & Peacebuilding Review*, 11, 121 – 134, oleh Warshel, Y. (2022). Dalam artikel yang memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, penulis menyatakan bahwa secara historis, Amerika Serikat telah bergabung dengan mayoritas negara yang memiliki posisi netral terhadap status Sahara Barat, namun, administrasi Presiden Trump telah mengubah status ini dengan mendukung penuh kedaulatan Maroko atas Sahara

---

<sup>12</sup> Rahmat Ilahi, Siti Zaimatun Nabila. (2022). Konflik Sahara Barat: Intervensi Amerika Serikat Dalam Maroko dan Polisario Front. *Pcd Studies Center Annual Review*. Edisi 1.

Barat. Dalam artikel ini, penulis berkesimpulan bahwa pergantian keputusan yang dilakukan oleh Presiden Trump ini didasari oleh keinginannya untuk mendukung Maroko atas konflik Sahara Barat. Amerika Serikat percaya bahwa kemerdekaan Negara Sahrawi bukanlah pilihan yang realistis untuk menyelesaikan konflik, dan berargumen bahwa otonomi sejati Sahara Barat di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang layak untuk menyelesaikan konflik ini dan mewujudkan kawasan yang lebih damai dan sejahtera.<sup>13</sup>

**Kempat,** Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel, oleh Rimapradesi, Y., & Sahide, A. (2021). Artikel ini bertujuan untuk membahas kepentingan sebenarnya yang dimiliki negara-negara Arab atas normalisasi hubungan mereka dengan Israel. Dalam studi yang menggunakan metode kualitatif dengan analisa induktif ini, penulis menarik kesimpulan bahwa persetujuan atas normalisasi hubungan Israel pada negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko didominasi keinginan mereka untuk menjaga keamanan dan kondisi ekonomi domestik mereka. Khususnya bagi Maroko, pengakuan AS atas Sahara Barat untuk Maroko akan menekan posisi Rabat dan front Polisario yang didukung Aljazair, yang dianggap Maroko sebagai ancaman. Selain itu, keinginan negara-negara Arab untuk meningkatkan stabilitas keamanan wilayah mereka membuat posisi mereka harus siap berpihak terhadap salah satu sekutu yang layak dan dinilai dapat melindungi mereka seperti Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dalam mengkaji normalisasi hubungan Maroko dan Israel. Penelitian sebelumnya membahas tentang alasan dari normalisasi hubungan

---

<sup>13</sup> Warshel, Y. (2022). Why “Peace” Between Morocco and Israel Matters for Western Sahara But Not for the Israeli-Palestinian Conflict. *African Conflict & Peacebuilding Review*, 11, 121 – 134.

<sup>14</sup> Rimapradesi, Y., & Sahide, A. (2021). *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel.*

Maroko-Israel dari sudut pandang Maroko, dampak dari intervensi Amerika Serikat yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dan kepentingan sebenarnya yang dimiliki negara-negara Arab atas normalisasi hubungan mereka dengan Israel. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada di dalam tinjauan pustaka, dikarenakan fokus dalam kepentingan Maroko dari segi politik, ekonomi, dan geopolitik, dari sudut pandang Maroko dari normalisasi Maroko dan Israel.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.<sup>15</sup> Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.<sup>16</sup>

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi

---

<sup>15</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15.

<sup>16</sup> James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 171, 173.

negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>17</sup> Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.<sup>18</sup> Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.<sup>19</sup> Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>20</sup> Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5.

<sup>18</sup> Mochtar Mas' oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 184.

<sup>19</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 27.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 32.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 15

- 1) Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup: menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;
- 2) Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
- 3) Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;
- 4) Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- 5) Melaksanakan tindakan yang diperlukan;
- 6) Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.<sup>22</sup> Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Hudson politik luar negeri adalah sub-disiplin dari hubungan internasional tentang politik luar negeri untuk menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat dan bermusuhan. Sedangkan menurut Crabb Jr. dalam *Coulombus & Wolf* politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya

---

<sup>22</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5.

<sup>23</sup> K.J. Holsti, 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta, hal. 21.

merupakan subjek kenegaraan yang abadi.<sup>24</sup> Dua sisi ini saling terkait yang alatnya adalah kekuatan nasional dan kepentingan nasional pada kurun waktu tertentu yang dirumuskan oleh para elit. Namun menurut K. J. Holsti, politik luar negeri merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam politik. Berdasarkan definisi tersebut politik luar negeri dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh negara dengan perilaku dan gagasan yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah serta mencapai kepentingan nasional suatu negara dalam politik internasional.

Setiap negara tentunya memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan praktik politik luar negeri, tetapi setiap negara tentunya akan memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi dalam melakukan politik luar negeri. Umumnya negara melakukan pelaksanaan politik luar negerinya agar dapat menciptakan pengaruh terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional serta menciptakan keuntungan bagi kepentingan negara. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka Panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang pada dasarnya tujuan jangka Panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kekuasaan.

K.J. Holsti memnerikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

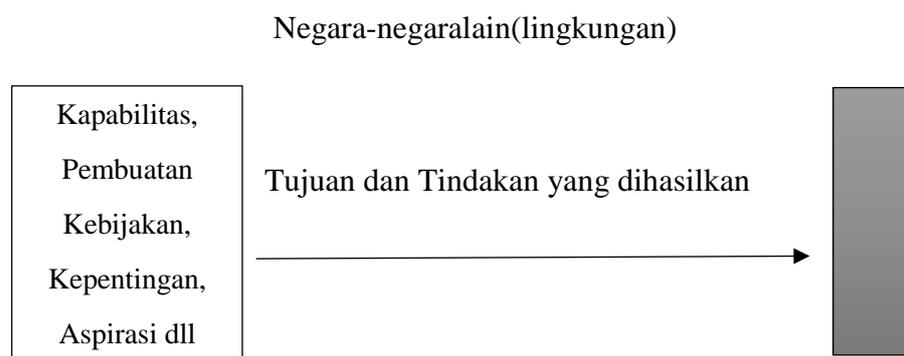
1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*) dan jangka Panjang (*Long-term*).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Yumitri Abidin. 2019. *Pengantar Politik Luar Negeri*. Katalog dalam penerbitan (KDT) UNAS PRESS- Universitas Nasional Jakarta. Hal-3.

<sup>25</sup> Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D. *Politik Luar Negeri*. Pustaka Ilmiah Universitas Padjajaran. Hal-5.

Masih menurut K.J. Holsti, politik luar negeri juga dipengaruhi oleh dua determinan, yakni determinan internal dan eksternal. Determinan internal meliputi: (1) kebijakan social-ekonomi dan keamanan, kenijakan luar negeri sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi dan keamanan internal suatu negara, (2) letak geografis mempengaruhi citra suatu negara pada dunia internasional, hal ini berkaitan dengan daya pikat negara tersebut, (3) struktur pemerintahan, berkaitan dengan bagaimana pihak pemerintah mengambil suatu kebijakan dalam politik luar negeri demi kepentingan nasional, (5) atribut nasional, berkaitan dengan karakteristik negara yang meliputi jumlah produk, perkembangan ekonomi serta aktivitasnya dalam dunia internasional.<sup>26</sup> Sedangkan determinan eksternal meliputi: (1) Struktur sistem, pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh struktur dan sistem internasional, (2) Stuktur ekonomi global, (3) Tujuan dan tindakan aktor lain merupakan respon atas tindakan aktor negara lain sehingga negara memiliki tujuan terarah demi mecapai kepentingan nasionalnya, (4) Masalah regional, jika suatu negara mendapat masalah dalam suatu Kawasan maka akan berdampak juga terhadap negara lain.<sup>27</sup>



**Gambar. 1 Model Politik Luar Negeri**

Sumber: Setiawan dan Sulastri (2017)

<sup>26</sup> K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, Prentice Hall. Inc, Angelwood Clippis, New Jersey, 1997, hal. 271-287.

<sup>27</sup> K. J. Holsti, *Ibid*, hal. 271-287.

Dari gambaran itu jelas bahwa ketika sebuah negara A melakukan Tindakan kepada lingkungan internasional termasuk di dalamnya negara dan sekumpulan negara serta unsur lainnya, maka itulah yang disebut dengan politik luar negeri. Jelas bahwa studi politik luar negeri bagaikan studi aksi, studi kebijakan dan bagaimana proses pengambilan keputusan sebuah negara serta bagaimana instrument yang digunakan dalam menjalankan kebijakan itu dan bagaimana pula respons terhadap kebijakan negara lain atau lingkungan.

Menurut Herman yang dikutip dari buku Laura Neak mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara. Herman menolak gagasan bahwa studi kebijakan luar negeri adalah studi tentang kebijakan, tetapi pandangannya adalah pandangan minoritas. Bruce Russett, Harvey Starr, dan David Kinsella mengambil pandangan yang berlawanan dan lebih luas: kita dapat menganggap kebijakan sebagai program yang berfungsi sebagai panduan perilaku yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan organisasi untuk dirinya sendiri oleh karena itu, kebijakan luar negeri adalah panduan untuk Tindakan yang di ambil di luar batas negara untuk memajukan tujuan negara.

Penulis dalam penelitian ini akan melihat faktor yang mempengaruhi dari politik luar negeri Maroko sebelum melakukan perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel hingga tercapainya kembali hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020. Penulis akan melihat dan menganalisa factor-faktor kebijakan luar negeri Maroko berdasarkan dari penjelasan K.J. Holsti yang meliputi kebijakan dari factor internal dan eksternal dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Maroko. Namun penulis hanya akan menganalisa beberapa faktor yang dianggap dominan terhadap pengaruh kebijaka luar negeri Maroko, faktor tersebut adalah masalah kebijakan sosial, ekonomi dan keamanan, regional dan global. Penulis

menganggap bahwa faktor tersebutlah yang kuat dalam menentukan kebijakan luar negeri Maroko terhadap normalisasi dengan Israel.

### 2.2.2 Kepentingan Nasional

Esensi dalam hubungan internasional yang tidak akan lepas dari tiga hal, yaitu hubungan antara aktor (*actors*), kekuatan (*power*), dan kepentingan (*interest*). Tiga hal tersebut yang berkolaborasi membentuk adanya identitas hubungan internasional. Negara maupun non-negara, dalam berhubungan dengan aktor lainnya akan saling berinteraksi bila terdapat kepentingan di antara keduanya. Dalam meraihnya, aktor akan menggunakan kekuatannya sebagai cara untuk memperoleh kepentingan tersebut.<sup>28</sup>

Kepentingan nasional atau *national interest*. Definisi yang mengacu pada *national interest* sangatlah luas. Banyak tokoh-tokoh yang mendefinisikan kepentingan nasional dengan banyak ragam. Menurut Felix E. Oppenheim, konsep kepentingan nasional adalah tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional, seperti menjaga otonomi politik dan integrasi teritorial kepentingan nasional secara praktik disinonimkan dengan *national security*.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Hans J Morgenthau, yang merupakan pencetus pertama pengertian kepentingan nasional, mendefinisikan kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan memperhatikan identitas, fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.<sup>30</sup>

Kepentingan nasional merupakan hal yang dasar dalam terjalannya hubungan diplomasi sebuah negara, karena sifat

---

<sup>28</sup> Morgenthau, Hans J. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace*. Alfred A Knopf

<sup>29</sup> Clinton, W. David. 1986. *The National Interest: Normative Foundation*. Cambridge University Press untuk University Of Notre Dame du lac sebagai ulasan politik.

<sup>30</sup> Oppenheim, Felix E. 1987. *National Interest, Rationality and Morality*. Sage Publications, Inc.

kepentingan nasional yang sangat penting sehingga menjadi sebuah alasan atau tujuan dari interaksi dan adanya hubungan diplomasi suatu negara. Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional, karena kepentingan nasional seperti sebuah dasar negara yang dibentuk dan juga sebagai pemersatu dari kepentingan individu-individu dalam negara yang sangat beragam. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional, sekaligus merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Holsti berpandangan bahwa kepentingan nasional atau apa yang disebut sebagai kepentingan dan nilai inti digambarkannya sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini menurutnya lagi, biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa reserve atau sikap kritis.

Para ahli hubungan internasional telah bersepakat bahwa politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungannya. Pun dengan segala kegiatan dan langkah-langkah yang diambil dalam ranah kebijaksanaan luar negerinya tidak lepas dari apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Maka, kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya. Perumusan dan penentuan kepentingan nasional suatu negara harus berpatokan pada apa yang menjadi kebutuhan dalam negeri dengan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Donal E. Nuchterlin menyebutkan sedikitnya ada empat jenis kepentingan nasional, yaitu:

- 1) Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara serta wilayahnya dan sistem politiknya dari ancaman negara lain;
- 2) Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;
- 3) Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya; dan
- 4) Kepentingan ideologi, ialah kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.<sup>31</sup>

Dengan demikian, national interest adalah interaksi yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai oleh negara tersebut dengan menggunakan kekuatan sebagai bentuk perwujudannya. Dalam mewujudkan hal ini diperlukan motivation maker yang berperan sebagai pendorong dalam mencapai kepentingan nasional. Peran ini dapat dilakukan oleh individu, organisasi/kelompok strategi dan ideologi.

Menurut Hans. J Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain.<sup>32</sup> Hubungan kekerasan atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan dan kerjasama.

---

<sup>31</sup> Yumitri Abidin. 2019. *Pengantar Politik Luar Negeri*. Katalog dalam penerbitan (KDT) UNAS PRESS- Universitas Nasional Jakarta. Hal-15.

<sup>32</sup> Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 163.

Sedangkan konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>33</sup>

Hal ini mengartikan bahwa, kasus politik luar negeri dapat saja merupakan masalah kelangsungan hidup, masalah keamanan, masalah ekonomi, keamanan ataupun politik suatu negara-bangsa. Masalah-masalah tersebut dapat mengemukakan menjadi masalah politik luar negeri apabila penyelesaiannya memerlukan dimensi luar-negeri, apabila kekuatan nasional negara-bangsa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya.

Sebaliknya, apabila masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan oleh kekuatan nasional, dengan tidak memerlukan aspek luar negeri, maka apapun yang menjadi pemicunya tidak dapat dianggap sebagai politik luar negeri. Masalah kelangsungan hidup negara bangsa misalnya, tidak selalu berarti bahwa yang mengemukakan berasal dari luar atau harus selalu melalui bantuan luar negeri (asing). Kasus pemberontakan, separatisme ataupun subversi lainnya, dapat saja ditumpas oleh kekuatan militer nasional negara bangsa yang bersangkutan.

Kepentingan nasional setiap negara pada umumnya meliputi berbagai hal seperti integritas nasional, melindungi martabat nasional Negara serta membangun kekuasaan.<sup>34</sup> Kepentingan nasional suatu Negara timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional atau kekuatan

---

<sup>33</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd. England, 1982, hal. 7

<sup>34</sup> Carlton, Clymer Rodee Dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.501-5-4.

nasional, sehingga Negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas Negaranya.<sup>35</sup> Berdasarkan konsep kepentingan nasional tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku serta tindakan yang diambil oleh pemimpin politik terhadap masalah-masalah domestic maupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional Negara mereka terhadap masyarakat internasional.

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kepentingan nasional. Pertama, menurut E. H. Carr, kepentingan nasional merupakan bentuk dari kebijakan luar negeri negara atau sebagai bentuk kekuatan strategis. Kedua, menurut T. May Rudy, kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Ketiga, menurut H.J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.<sup>36</sup> Keempat, menurut Paul Seabury, kepentingan nasional didefinisikan melalui dua sudut pandang yaitu secara deskriptif yang memiliki arti sebagai tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedangkan secara normatif, kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita dari suatu bangsa dimana bangsa tersebut berusaha mencapainya dengan cara berhubungan dengan negara lain.<sup>37</sup> Kelima, menurut Daniel S. Papp, kepentingan nasional meliputi beberapa aspek yaitu ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hal.29.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Luthfiana Chandra A.M. dan Mahrita. (2012). *Defining National Interest*.

<sup>38</sup> Daniel. S. Papp. (1988). *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding, Second Editions*. New York: MacMillan Publishing Company. Hal. 29.

Rosenau membedakan konsep kepentingan nasional menjadi dua bagian yaitu sebagai alat analisis dan sebagai tindakan politik. *As an analytic tool, it is employed to describe, explain, or evaluate the sources or the adequacy of a nation's foreign policy. As an instrument of political action, it serves as a means of justifying, denouncing or proposing policies. Both usages, in other words, refer to what is best for a national society. They also share a tendency to confine the intended meaning to what is best for a national society. Beyond these general considerations, however, the two uses of the concept hav little in common.* Yang bermakna, Sebagai alat analisis, kepentingan nasional digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi sumber atau kecukupan kebijakan luar negeri suatu negara. Sedangkan sebagai tindakan politik, kepentingan nasional berfungsi sebagai sarana untuk membenarkan, mencela, atau mengusulkan kebijakan. Dengan kata lain, kedua penggunaan itu merujuk pada apa yang terbaik untuk masyarakat nasional. Kedua konsep tersebut juga sama-sama membatasi makna yang dimaksudkan dengan apa yang terbaik bagi masyarakat nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep kepentingan nasional merupakan alat analisis untuk menerangkan, menjelaskan, dan mengevaluasi sumber-sumber atau alasan politik luar negeri suatu negara. Dengan konsep kepentingan nasional ini maka perilaku politik luar negeri dapat dengan lebih objektif dianalisis. Berdasarkan pengertian di atas, maka kepentingan nasional dapat diartikan alat analisis untuk menerangkan, menjelaskan dan mengevaluasi sumber-sumber atau alasan politik luar negeri suatu negara. Dengan konsep kepentingan nasional ini maka, perilaku politik luar negeri dapat dengan lebih objektif dianalisis.

Kepentingan nasional didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori/keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagi dalam beberapa jenis yaitu,

kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial dan kepentingan nasional yang bersifat non vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan. Berbeda dengan kepentingan non vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasil dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik di kemudian hari dengan jangka waktu yang lama. Dari pengertian di atas mengenai kepentingan nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan teritorial dan manusia menjadi hal yang sangat mendasar bagi sebuah negara. Kepentingan mempertahankan keutuhan sebuah negara termasuk warga di dalam dan di luar negeri menjadi perhatian banyak negara modern saat ini. Sedangkan, untuk kepentingan ideologi dapat dikesampingkan ketika muncul prioritas menghadapi ancaman wilayah.

### 2.2.3 Geopolitik

Menurut Hagan, istilah geopolitik diperkenalkan dalam *Foundations for a System of Politics* (1920) untuk hal-hal yang menyangkut situasi wilayah negara, kondisi dan bentuk, serta sumber daya alam dan fisik<sup>39</sup> Kjellén-lah yang menciptakan kata tersebut dan saat itu, aliran pemikiran geopolitik di Jerman merasa cocok dengan istilah tersebut.

Dalam *Geopolitics: The Geography of International Relations* (2003), geopolitik dipahami Saul Bernard Cohen sebagai analisis interaksi antar sisi, di satu sisi adalah keadaan geografis dan perspektif dan di sisi lain adalah proses-proses politik.<sup>40</sup> Keadaan ini terdiri dari ciri-ciri dan pola geografis serta wilayah berlapis yang dibentuknya. Proses politik termasuk kekuatan yang beroperasi di tingkat internasional dan di kancah domestik yang memengaruhi

---

<sup>39</sup>Charles B Hagan. (1942). Geopolitics. *The Journal of Politics*. Vol.4. No.4. Hal 478-490.

<sup>40</sup> Saul Bernard Cohen. (2003). *Geopolitics: The Geography of International Relations*. Maryland: Rowman & Littlefield.

perilaku internasional. Keduanya (keadaan geografis dan proses politik) bersifat dinamis saling memengaruhi. Peter J. Taylor dalam *Geopolitics, Political Geography and Social Science* (2000) berusaha untuk meletakkan geopolitik ke dalam beberapa perspektif institusional.<sup>41</sup> Sebagai sebuah sub disiplin ilmu, geopolitik amatlah kecil sekalipun berubah dalam ukuran lintas negara dan waktu.

Dibandingkan dengan disiplin serupa dalam departemen Hubungan Internasional di perguruan tinggi dan banyak jurnal, geopolitik memiliki hubungan yang lemah. Orang dapat memandang geopolitik sebagai periferi dari sebuah periferi; diletakkan pada perbatasan geografi manusia, yang akhirnya tidak pernah berdiri sendiri dalam inti ilmu sosial. Taylor menganggap hal ini sebagai analogi yang agak kejam dan kasar akan tetapi para penulis geopolitik tidak kelihatan memiliki ketakutan oleh peletakkan intelektual seperti itu.

Mereka menemukan geopolitik dalam segala hal dari politik tingkat tinggi hingga budaya populer sehingga studi mereka yang begitu penting itu berada di luar seluruh proporsi dari ukuran sub disiplin yang ada. Geopolitik sebagai pemikiran dan praktik terkait dengan pembentukan negara dan negara-bangsa sebagai lembaga politik yang dominan. Geopolitik awalnya dipahami sebagai ranah konflik antarnegara dengan asumsi bahwa satu-satunya negara yang sedang dibahas adalah negara-negara Barat yang kuat. Ada upaya teoritis untuk memisahkan geopolitik dari imperialisme dominasi negara kuat atas negara lemah.<sup>42</sup>

Dalam tatanan dunia baru masa kini, menurut Ó Tuathail yang dikutip dari Priyono & Yusgiantoro (2017), spesifikasi hubungan

---

<sup>41</sup> Peter J Taylor. (2000). *Geopolitics, Political Geography and Social Science*. in K. Dodds and D. Atkinson (Vol. Ed.), *Geopolitical Traditions: A Century of Geopolitical Thought*. London: Routledge. Hal. 375-379.

<sup>42</sup> Colin Flint. (2006). *Introduction to Geopolitics*. New York: Routledge. Hal 17.

pasca-Perang Dingin antara geografi, kekuatan, dan tatanan dunia bervariasi sebagai khayalan geopolitik, bersaing satu sama lain untuk membatasi “geopolitik baru” (*new geopolitics*).<sup>43</sup>

Jika geopolitik adalah alat kekuasaan dan kekuatan negara untuk berkompetisi di wilayah teritorialnya, maka geostrategi merupakan suatu strategi negara dalam memanfaatkan kondisi geografinya untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana dalam rangka mencapai tujuan nasional. Antara geopolitik dan geostrategi saling erat berkaitan dimana geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara.<sup>44</sup> Dalam hubungannya, antara geopolitik dan geostrategi, geografi yang dimaksud tidak secara murni berdasarkan pada letak geografis suatu negara saja namun juga berdasarkan pada hubungan antar institusi politik negara dengan kondisi geografis disekitarnya. Dengan demikian hal itu dapat disebut dengan geografi politik atau political geography. Geopolitik sendiri memiliki empat unsur pembangun yaitu keadaan geografis, keadaan politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta kebijakan suatu negara. Untuk itu, antara geopolitik dan geografi politik memiliki beberapa peranan penting. Pertama, menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang ada. Kedua, menghubungkan kebijakan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam sehingga akan mempengaruhi pembuatan kebijakan luar dan dalam negeri. Ketiga, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan negara sehingga membenarkan tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Gearóid Ó Tuathail. (1998c). Thinking Critically About Geopolitics. in Ó Tuathail, G., Dalby, S. & Routledge, P. (Vol. Ed.). *The Geopolitics Reader*. London: Routledge. Hal. 2.

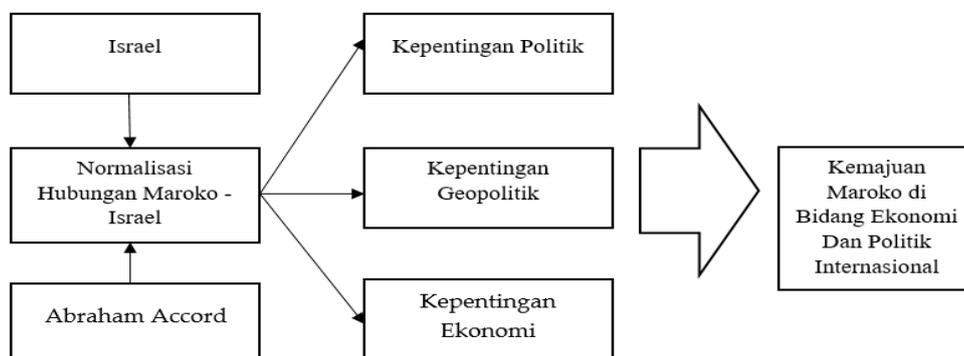
<sup>44</sup> Colin Flint. (2006). *Introduction to Geopolitics*. New York: Routledge. Hal. 19.

<sup>45</sup> *Ibid*

Dalam konsep geostrategi dimana Jakob Grygiel menjelaskan bahwa geostrategi sebagai konsep yang arah geografisnya berasal dari kebijakan luar negeri sebuah negara. Geostrategi dapat mendeskripsikan arah geografis kebijakan luar negeri dari proyeksi kekuatan militer dan aktivitas diplomasi, serta Geostrategi juga dapat dikatakan sebagai konsep yang fleksibel karena kebijakan luar negeri sebuah negara dapat berubah dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Konsep geostrategi sebagaimana beroperasi di tingkat negara, dan disebabkan oleh banyak faktor yang berasal dari dalam negara tersebut ataupun dari negara lain.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Abraham Accord adalah perjanjian pernyataan Bersama antara Israel, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat pada 13 Agustus 2020. Hal ini merujuk kepada perjanjian kerja sama diantara negara untuk melakukan normalisasi maupun membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang di inisiasi oleh Amerika Serikat demi terwujudnya kepentingan nasional masing masing negara. Dalam hal ini Maroko tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel ikut andil dalam perjanjian kesepakatan kerja sama secara resmi yang dinamai dengan *Joint Declaration : The Kingdom of Morocco, The United States of America and the State of Israel*.



**Gambar. 2 Kerangka Berpikir**

**Sumber: Disusun Penulis**

Maroko memiliki kepentingan nasional dalam mewujudkan pengakuan dari negara lain untuk mengakui Sahara Barat menjadi bagian dari negaranya, kepentingan geopolitik Maroko dalam melakukan kontrol wilayah Sahara diharapkan dalam perjanjian ini mendapatkan efek tekanan besar dari pengakuan negara lain untuk meredam dominasi kelompok pemberontak Polisario dan juga dengan kepentingan ekonominya diharapkan melalui kerja sama ini mampu meningkatkan pendapatan negara menjadi lebih besar dari sektor perdagangan, ekspor, pariwisata dan juga dominasi ekonomi Maroko di sekitar wilayah Afrika, juga memperkuat posisi Maroko dalam Politik Internasional dengan ikut andilnya Maroko dalam perjanjian kerja sama tersebut.